

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES.
- Mahfud MD, 2010, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J, 2006, *Mahkamah Konstitusi dan Hak Uji Materi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia: Pasca reformasi*. PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J, 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, A. M. 2005, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Total Media.
- Indrati, M.F 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius.
- Indrati, M. F. 2010, *Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Isra, S, 2010, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Konstitusi Press.
- Kusumaatmadja, M. 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni.
- Lev, D. S. 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan perubahan*. LP3ES.
- Amiruddin, & Asikin, Z. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Martitah. 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Kompress.
- Marzuki, H. M. L. 2009, *Peran Hakim Dalam Negara Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. K. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Palguna, I D. G. 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Konstitusi Press.
- Siahaan, M. 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konstitusi Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soemantri, S. 2007, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi di Indonesia*. Refika Aditama.
- Susanto, F. S. 2007, *Penelitian Hukum*. CV Ganda.
- Syahuri, T. 2013, *Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Usman, A. 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan Umum*. Raja Grafindo Persada.
- Ginting, Y. 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara*. Universitas Brawijaya.
- Indrati, M. F. 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2020, *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika Dan Implementasi Produk Hukum KPU*. KPU RI.
- Manan, B. 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill Co.
- Ramadhanil, F., & Simabura, C. 2016, *Pemilu Di Indonesia: Kajian Teori Dan Praktik*. Perludem.
- antosio, T. 2006, *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

C. Jurnal & Karya Ilmiah Lainnya

- Fakhriah, E. L. 2013. Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 327–348.
- Huda, N. 2011. Judicial Review dan Konstitusionalisme Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 1–19.
- Isra, S. 2008. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 5(1), 116–137.
- Isra, S. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Akhir dan

Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 9(4).

Isra, S. 2015. Pembubaran Partai Politik: Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 1–26.

Prang, A. J. 2011. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77–94.

Siregar, M. Y. 2013. Mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2(1).

Susetyo, H. 2003. *Judicial Review Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Susanti, B. 2008. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38(4), 517–538.

Susetyo, H. 2003. Judicial Review Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33(1), 53-67.

Syarifudin, A. 2019. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 1–21.

Dewi, L. Y., dkk. 2022, Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1).

Kurnianingrum, T. P., dkk. 2012, Pergeseran kekuasaan tipologi ketiga: Fenomena kekuasaan ke arah *constitutional heavy*. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 623–624. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

D. Artikel

Sandi Aditya Kesuma, <<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/membedah-putusan-mk-terkait-pembolehan-kegiatan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-studi-perbandingan-antara-kampanye-di-pendidikan-menengah-dan-di-pendidikan-tinggi/>>. Akses pada tanggal 1 Maret 2025.

Vitorio M, <<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/21/12150811/federasi-serikat-guru-indonesia-kritik-putusan-mk-izinkan-kampanye-di>>. Akses tanggal 10 Maret 2025.

Kemenko PMK. *Menko PMK tanggapı putusan MK terkait kampanye di lembaga pendidikan*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. <<https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-tanggapi-putusan-mk-terkait-kampanye-di-lembaga-pendidikan>>. Akses pada tanggal 28 Mei 2025.

Tempo.co. *Pro-kontra putusan MK bolehkan kampanye di fasilitas pendidikan*. <<https://www.tempo.co/politik/pro-kontra-putusan-mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pendidikan--151064>>. Akses pada tanggal 28 Mei 2025.

Wakil Presiden Republik Indonesia. (2023, 26 Agustus). *MK bolehkan kampanye di lembaga pendidikan, Wapres ingatkan kerawanan polarisasi di kampus*. Wakil Presiden Republik Indonesia. <<https://www.wapresri.go.id/mk-bolehkan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-wapres-ingatkan-kerawanan-polarisasi-di-kampus/>>. Akses pada tanggal 28 Mei 2025.